



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EPYARDI ASDA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 753220

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 18.486.825.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 611 m2/492 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/263 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.213.260.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/183 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.009.125.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 637 m2/411 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 2.464.440.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1002 m2/566 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
7. Tanah Seluas 6853 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 3.760.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. MOBIL, LEXUS LX 570 AT Tahun 2015, LAINNYA Rp. 1.500.000.000



3. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2018, LAINNYA Rp.
1.000.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER2. 7SRZ Tahun 2017, LAINNYA Rp.
300.000.000
5. MOBIL, BMW 5281 CKD AT Tahun 2013, LAINNYA Rp.
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.615.071.314
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.780.000.000
Sub Total	Rp.	66.641.896.314
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	66.641.896.314

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.